

KEBIJAKAN DAN POLITIK INTEGRASI IMIGRAN DI PRANCIS¹Wahyuddin, ²Irianti Bandu, ³Muhammad Hasyim¹wahyuddin_unhas@yahoo.com, ²antybandu62@gmail.com, ³hasyimfrance@unhas.ac.id^{1,2} Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin**Abstract**

This study aimed at discussing immigration in France by focusing on two aspects, namely politics and identity. The first concerns the policy of the French government toward immigration in the course of history. The second aspect discusses how the government imposes the politic of “assimilation” of the migrant’s identity as an effort to integrate their society. It means that the immigrants are asked to behave as the “French native”, particularly in the public space. Collecting data are carried by field research; observation, interview and literature studies. While analyzing the data, it is used the interpretative method is.

Keywords: migration, identity, integration, France

PENDAHULUAN

Prancis merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan para imigran. Menurut data statistik hingga tahun 2020, dari sekitar 67 juta orang yang hidup di Prancis, 6,8 juta orang atau lebih dari 10% merupakan imigran dimana 2,5 juta diantaranya telah mendapatkan kewarganegaraan Prancis (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212>). Persentasi jumlah tersebut menunjukkan sebuah grafik progresif. Pada tahun 1975, jumlahnya hanya 7,5% sementara pada tahun 1946 berjumlah hanya 4,4%. Trend semakin meningkatnya jumlah imigran yang hidup di negara Napoleon tersebut memunculkan kekhawatiran bagi orang Prancis “asli” dengan alasan yang beragam. Argumentasi budaya, keamanan dan ekonomi menjadi alasan-alasan yang diajukan untuk menunjukkan resiko yang dihadapi negara Prancis dengan keberadaan para imigran. Identitas budaya para imigran dan sikap imigran yang dianggap tidak kompatibel dengan prinsip – prinsip republik sering dirujuk sebagai masalah yang mendasar. Selain itu, *stereotype* kejahatan yang

melekat pada anak-anak imigran menjadi sebuah alasan lain yang menunjukkan sisi negatif keberadaan mereka. Demikian pula semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi alasan lain untuk menolak imigran.

Apa yang sesungguhnya disebut imigran di Prancis pada dasarnya tidak tunggal sebab asal-usul mereka beragam. Sejarah dan motivasi kedatangan mereka berbeda-beda pula. Jika pada awalnya imigran di Prancis identik dengan kedatangan orang-orang dari negara tetangga seperti Italia, Spanyol dan yang lainnya sejak akhir abad ke XIX, maka secara progresif setelah paruh kedua abad ke XX, imigran terutama terkait dengan hadirnya orang-orang dari bekas koloni Prancis di Afrika, baik itu dari Afrika Utara maupun Afrika Barat. Ditambah pula, hadirnya imigran dari negara eks jajahan Prancis di Asia Tenggara menjadi akumulasi keragaman asal negara imigran yang saat ini telah beranak cucu di negara tersebut. Sementara itu kehadiran orang “asing” tersebut bisa didorong baik oleh motivasi ekonomi, untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka, maupun motif politik, untuk menyelamatkan diri dari

berkuasanya rezim otoritarian di negara-negara asal para imigran tersebut.

Bagi orang Prancis “asli” sendiri, kehadiran imigran tersebut di apresiasi secara berbeda. Asal-usul negara para imigran dianggap merepresentasikan sifat dan sikap tertentu. Sebagian dianggap baik dan kompatibel bagi Prancis dan sebagian lainnya dianggap buruk dan tidak kompatibel. Tentu ini sebuah gambaran

subjektif yang bersifat *stereotype* namun pada satu sisi dapat menunjukkan derajat keberterimaan bagi masyarakat Prancis secara luas. Dalam hal tersebut orang-orang Imigran dari Aljazair mendapat penilaian sangat buruk sementara itu imigran keturunan imigran Italia dan Spanyol dianggap sangat baik (Hargreaves, A.G. 2007).

Tabel 1
Persepsi orang Prancis terhadap Imigran

Asal Negara	Baik (%)	Buruk (%)
Italia	81	9
Spanyol	81	9
Portugal	70	18
Orang-orang Asia	47	25
Tunisia	37	28
Orang Afrika Barat (<i>Black Africans</i>)	36	48
Maroko	33	48
Turki	19	43
Orang-orang Gypsi	21	64
Aljazair	21	70

Sumber: Survey SOFRES, 1984 : 22

Dari data di atas terlihat bahwa pada umumnya asal negara imigran yang mendapat kesan buruk di mata orang Prancis “asli” adalah terutamanya orang-orang dari Afrika utara yakni Aljazair dan Maroko. Demikian pula orang-orang Gypsi yang umumnya berasal dari negara Eropa timur mendapat juga cap yang buruk. Orang-orang Turki yang secara geografi dekat dengan Eropa juga merupakan kelompok imigran yang memiliki kesan yang buruk.

Apa yang bisa dikatakan lebih jauh adalah imigran yang berasal dari negara dengan agama dan budaya Islam yang kuat mendapat kesan yang kurang baik dibandingkan dengan Imigran asal Eropa maupun Asia, kecuali imigran Gypsi yang juga secara geografi merupakan penduduk benua Eropa namun mendapat kesan yang buruk. Berangkat dari kenyataan ini,

makalah ini akan mencoba membahas fenomena tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Prancis terkait masalah imigran ?
2. Bagaimana politik pemerintah Prancis terkait dengan identitas warganya ?
3. Mengapa Imigran asal Afrika Utara mendapat kesan yang buruk ?

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data-data diperoleh melalui beberapa metode yakni metode wawancara dan observasi sebagai data primer. Selain itu data-data juga diperoleh melalui data statistik baik yang diterbitkan oleh Insee, lembaga statistik resmi Prancis maupun statistik yang

diterbitkan oleh lembaga maupun individu yang dianggap kredibel. Data juga diperoleh melalui penelusuran pustaka, baik dari buku-buku, sumber-sumber daring (internet) maupun surat kabar. Kesemuanya itu dijadikan satu kesatuan data yang dapat memberi satu perspektif holistik mengenai tema yang dibahas.

Metode analisis data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis interpretative. Antara data dan teori dihubungkan oleh interpretasi subjek. Analisis penelitian sosial-humaniora bertumpu pada argumentasi yang dibangun berdasarkan data yang ada dengan menyandarkan proses interpretasi pada pilihan-pilihan teori yang digunakan.

KAJIAN PUSTAKA

Sejarah terbentuknya identitas “ke Prancis-an”

Seperti halnya Indonesia, wilayah yang dewasa ini menjadi bagian dari negara Prancis merupakan teritori yang dihuni beragam suku dengan budaya yang beragam. Namun invasi kekuasaan Romawi pada sekitar abad awal masehi menghasilkan perpaduan kebudayaan yang dikenal dengan istilah *Gallo-Romain* dimana salah satu elemen penting dalam kehidupan saat itu adalah kekristenan. Sejak raja Romawi, Constantinus memeluk agama kristen pada abad ke III masehi, boleh dikatakan aristokrasi menjadi satu tarikan nafas dengan kekristenan pada peradaban *Gallo Romain*. Fondasi identitas kebudayaan ini semakin kokoh ketika kurang lebih 10 abad lamanya masyarakatnya hidup di abad pertengahan, zaman ketika Institusi kerajaan dan gereja menjelma menjadi otoritas absolut sehingga jika pada awalnya masyarakatnya memiliki identitas budaya yang beragam, maka identitas kekristenan menjadi ciri pokok pada periode tersebut. Meskipun spirit aristokrasi dan spirit kekristenan sebenarnya kadang tidak selalu sejalan

seperti yang terlihat ketika perang panjang antara kelompok katolik dan protestan yang melahirkan perjanjian *Edit de Nantes*, yang karena itu lalu raja Louis XIV mencetuskan ide absolutisme untuk merestorasi kuasa aristokrasi dan berusaha meminggirkan peran elit-elit agama. Meskipun demikian, secara umum identitas kekristenan dan Aristokrasi menjadi akar kuat dalam kebudayaan Prancis yang dipersepsikan hingga hari ini.

Dinamika sejarah lalu mengubah pendulum ketika kekuasaan Aristokrasi hancur di saat terjadi Revolusi Prancis, momen ketika emporium runtuh yang bertransformasi menjadi negara republik. Secara perlahan pada masa-masa berikutnya agama mulai dipinggirkan, lahir konsep pemisahan agama dan negara (*laicité*), praktek politik sekularis yang berlangsung secara bersamaan dengan semakin menjauhnya masyarakat dari agama dan berubah menjadi entah ateis ataupun agnostik (baca Weil, P. 2021). Awal abad ke XX, secara resmi lahir Undang-undang mengenai separasi agama dan negara. Demikianlah proses historis yang terjadi sejak awal masehi hingga awal abad ke XX membentuk identitas yang berakar pada ide Aristokrasi, Kekristenan dan Republikanisme. Hal tersebut secara progresif meminggirkan identitas kebudayaan yang telah ada sebelum wilayah tersebut mengalami pengaruh Romawi. Identitas budaya masyarakat seperti bahasa-bahasa lokal; Breton, Catalan, Normand, Langue d’Oc dll hidup secara marginal dalam superioritas politik nasional bahasa Prancis. Prancis dengan prinsip republikanismenya menghendaki adanya satu kesatuan dalam identitas. Apa yang hendak dikatakan dengan semua ini adalah meskipun hari ini banyak orang beranggapan bahwa Prancis memiliki identitas yang seolah-olah homogen (*monoculture*), pada dasarnya secara kebudayaan, sejak awal masyarakatnya dibangun oleh kebudayaan yang berbeda-

beda (*multiculture*). Hanya karena kuatnya akar dan pengaruh dan budaya Romawi yang telah terkristenisasi dan juga politik Republik yang menghendaki lahirnya sebuah “budaya bersama” (*culture commun*), maka identitas ke”Prancis”an seolah – olah bersifat tunggal. Atas pemahaman model identitas macam inilah, kehadiran imigran dari bekas koloni Prancis yang pada umumnya berbeda secara budaya, agama maupun tampilan fisik sejak abad ke XX dianggap oleh sebagian orang Prancis sebuah ancaman.

Jika kita mencari penjelasan atas model pembentukan identitas tersebut, barangkali apa yang dikatakan Emanuelle Castells dapat membantu. Castells menjelaskan tipologi identitas berdasarkan aktornya yakni (1) identitas – legitimasi (*l’identité-légitimante*) (2) identitas – resisten (*l’identité-résistance*) (3) identitas – proyek (*l’identité-projet*) (Castells, 1999, hlm.18). Identitas pertama adalah identitas yang coba dikonstruksi oleh institusi dengan tujuan membentuk masyarakat sesuai dengan imajinasi institusi tersebut. Identitas dalam kaca mata ini dibangun atas relasi dominasi dan otoritas aktor. Pembentukan nasionalisme oleh sebuah negara merupakan contoh operasional identitas – legitimasi. Model inilah yang dapat menerangkan praktek apa yang telah dikemukakan sebelumnya. Identitas yang kedua berbanding terbalik dengan yang pertama. Jika yang pertama identitas dikonstruksi oleh institusi atau kelompok elit yang memiliki otoritas dan dominasi, maka identitas-resisten dibangun oleh kelompok-kelompok yang merasa ternormalkan dalam sebuah struktur masyarakat. Mereka mencoba untuk melawan identitas yang dibangun oleh kelompok dominan dengan mendaku pada identitas mereka sendiri yang berbeda dengan kelompok dominan. Praktek ini banyak dijumpai dalam masyarakat modern lanjut (*late modernism*) dimana kelompok-kelompok yang selama ini tidak

diakui oleh negara tampil resisten. Upaya-upaya separatis di berbagai belahan dunia dimana ada kelompok tertentu dalam sebuah wilayah yang karena merasa berbeda secara kebudayaan, ditambah oleh perasaan termarjinalkan secara ekonomi menuntut kemerdekaan. Hal yang nyata misalnya orang-orang dengan identitas Catalonia yang menuntut kemerdekaan dari negara Spanyol. Dalam derajat tertentu, ekspresi masyarakat migran di Prancis dapat dijelaskan melalui tipologi identitas ini. Sementara itu “identitas-proyek” terkait dengan pembentukan atau konstruksi identitas berbasis kesamaan material kultural yang dimiliki. Kesamaan kelas sosial dan juga kesamaan cita-cita menjadi dasar dari lahirnya identitas – proyek ini. Misalnya saja kelompok feminis yang berjuang agar hak-hak perempuan diakui oleh negara merupakan wujud perjuangan yang berakar pada adanya identitas-proyek ini. Pada dasarnya ke-tiga jenis ini bisa bertransformasi dari identitas proyek ke identitas-legitimasi. Ambil contoh ketika sekelompok orang yang memiliki kesamaan ide mengenai ide kesetaraan jender. Dalam sebuah masyarakat yang patriarkal, identitas-proyek berbasis kesamaan ide tersebut bisa menjelma menjadi sebuah identitas resisten yakni menjadi wahana untuk berjuang melawan kelompok dominan. Pada akhirnya ketika perjuangan mereka berhasil dan ketika mereka tampil sebagai elit-elit baru, saat itu identitas yang mereka usung akan menjelma menjadi identitas-legitimasi. Barangkali oleh sebagian orang Prancis, siklus inilah yang mereka khawatirkan ketika para imigran tersebut suatu saat mampu mendominasi kehidupan dan menentukan arah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Relasi Negara dan Identitas Warga

Dalam konteks relasi antar warga negara yang memiliki keragaman akar kebudayaan, negara sebagai satuan politik

berupaya menghasilkan integrasi di antara kelompok-kelompok budaya yang ada. Secara sosiologis, terdapat beberapa model yang dikembangkan secara berbeda oleh masing-masing negara berdasarkan politik kebudayaan yang dianut ; (1) model asimilasi, (2) model *melting pot*, (3) model pluralisme budaya (*cultural pluralism*) dan (4) model multikultural (Giddens, A : 2009). Model asimilasi adalah model dimana para imigran sebagai kelompok pendatang diminya meninggalkan budaya dan praktek hidup asal mereka dan menggantinya dengan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan penduduk asli. Mereka diminta untuk mengganti bahasa, cara berpakaian dan budaya asal lainnya sebagai cara berintegrasi dengan tatanan baru. Sementara itu, model *melting pot* adalah kebijakan politik kebudayaan negara yang tidak menghalangi praktek kebudayaan para imigran, sebaliknya justru diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan budaya yang sudah ada dengan tujuan memberi bentuk baru dalam kerangka evolusi kebudayaan. Dalam masyarakat semacam ini akan jamak dijumpai bentuk budaya perpaduan (*hybrid*), misalnya dalam hal kuliner, sumber inspirasinya bisa dari beragam kuliner tradisional masyarakat. Amerika sering dirujuk sebagai negara yang menerapkan kebijakan kebudayaan *melting pot* ini. Model ketiga pluralisme budaya (*cultural pluralism*) adalah model dimana budaya- budaya etnik warga diberi ruang secara luas untuk tumbuh dan berkembang, bahkan termasuk jika kelompok masyarakat hidup secara terpisah (model adanya *ghetto*), tetapi juga mereka memiliki akses setara terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik secara luas. Dalam beberapa hal, Inggris di waktu lalu bisa menjadi rujukan ini dimana, orang-orang India, Cina Bangladesh dan lainnya banyak yang hidup dalam komunitas-komunitas yang berbasis kesamaan budaya, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk berinteraksi

dalam kehidupan publik secara lebih luas. Model terakhir merupakan pengembangan dari model pluralisme budaya, sering diistilahkan dengan “multikulturalisme”. Berbeda dengan model pluralisme budaya yang memberikan kesempatan yang sama terhadap kelompok-kelompok budaya yang berbeda tetapi secara ekonomi memiliki kesenjangan, model multikulturalisme tidak hanya menekankan aspek kesetaraan kebudayaan tapi meninggalkan aspek ekonomi, tapi menciptakan masyarakat yang setara baik secara kebudayaan dan secara ekonomi pun tidak tersegregasi. Swiss dan Kanada barangkali contoh negara yang bisa disebutkan menjalankan model tersebut .(baca, Parekh, B. 2000). Model pluralisme budaya dianggap tidak memberi ruang yang cukup terhadap kemungkinan saling belajar dan saling faham lintas budaya karena sifat *ghetto* yang tertutup. Pandangan multikulturalisme berangkat dari asumsi bahwa sebuah kebudayaan membutuhkan “budaya lain” baik sebagai refleksi atas kebudayaan mereka maupun sebagai kritik. Pandangan ini juga secara jelas mengasumsikan bahwa pada dasarnya seorang individu dapat memiliki identitas budaya yang beragam, sehingga perlu komunikasi dan keterbukaan terhadap “yang lain”.

Tentang model yang terakhir tersebut, bukannya mulus tanpa kritik. Keterbukaan dan respek terhadap “yang lain” tetaplah harus sejalan dengan kemungkinan kritik karena kalau tidak, bisa saja “yang lain” tersebut berjalan di luar hukum negara. Dengan kata lain model multikulturalisme memiliki potensi konflik internal dengan sistem negara hukum. Misalnya jika ada sebuah kebudayaan masyarakat yang terlarang di sebuah negara, maka kemungkinannya negara akan mentolerir atas nama multikulturalisme tersebut. Kritik yang terakhir ini berakar khususnya pada budaya imigran di negara-negara Eropa. Alba (2003) yang merefleksikan

masyarakat Amerika melihat bahwa beberapa hal yang dapat menjadi indikator adanya integrasi diantaranya konversi keyakinan dan perkawinan lintas agama dan etnis.

HASIL DAN DISKUSI

Dinamika Kebijakan tentang imigrasi di Prancis

Dinamika migrasi di Prancis pertama-tama sebenarnya bukan soal kedatangan orang-orang non Prancis yang datang ke Prancis, namun lebih dalam bentuk migrasi internal berupa urbanisasi. Orang-orang dari pelosok desa Prancis berdatangan ke pusat-pusat kota besar pada pertengahan abad ke XIX. Bertumbuhnya industri di kota mendorong masyarakat desa melakukan urbanisasi. Meskipun demikian, melihat tingginya tingkat angka kebutuhan tenaga kerja karena industrialisasi ini, orang-orang dari negara tetangga mulai datang untuk memanfaatkan kesempatan. Berdasarkan sensus tentang jumlah orang asing yang hidup di Prancis, pertama kali dilakukan tahun 1851, terdapat hanya 1% dari total orang Prancis. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendatang pada pertengahan abad XIX belumlah signifikan. Selain itu, hingga saat itu asal negara imigran tersebut umumnya berasal dari negara-negara tetangga Prancis sendiri. (Hargreaves, A.G, 2007).

Dalam konteks industrialisasi abad tersebut, dibanding negara tetangga, Prancis merupakan pionir sehingga tak mengherankan jika negara ini menjadi wilayah yang menarik bagi orang-orang dari negara tetangga. Hingga periode Perang Dunia 1, boleh dikatakan Prancis menerapkan kontrol yang sangat lemah terhadap alur keluar masuknya orang di perbatasan mereka. Bahkan dalam konteks tertentu, pemerintah Prancis bahkan mengundang orang asing untuk masuk ke negara mereka guna mengisi sektor-sektor industri yang tak mampu dipenuhi oleh

warga negara sendiri. Dengan kata lain, hingga periode tersebut aliran imigran tidaklah dianggap sebuah persoalan bagi pemerintah, justru sebaliknya diapresiasi positif sebagai pihak yang berkontribusi dalam pembangunan.

Selain dalam konteks imigran yang datang karena motif ekonomi, status Prancis sebagai salah satu negara pelopor HAM menempatkan mereka sebagai tujuan para pencari suaka baik itu pengungsi (*refugee*) maupun bagi pelarian politik (*asylum*). Peran humanis ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka orang asing di Prancis. Pelarian politik orang-orang Italia pada periode Mussolini, demikian juga ketika terjadi perang sipil di Spanyol pada 1936 dan Nazisme di Jerman dan Eropa Timur tahun 1930an menjadi beberapa konteks historis yang membuktikan komitmen Prancis dalam hal-hal kemanusiaan. Dalam periode berikutnya, peran tersebut tetap diemban Prancis. Kemenangan rezim komunis di Vietnam 1978 mendorong eksodus orang-orang Vietnam yang merupakan pencari suaka di Prancis. Demikian pula naiknya rezim Pol Pot mendorong eksodus orang-orang Kamboja ke negara Napoleon ini.

Salah satu momen krusial ketika jumlah imigran non-Eropa mulai massif di Prancis adalah ketika memasuki periode *les trentes gloires*, yakni periode 30 tahun pasca perang dunia kedua, sekitar 1940 an – 1970 an. Rekonstruksi pasca perang yang didukung oleh *economic boom* - akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat menjadi faktor determinan. Selain itu, defisit demografi karena angka kelahiran yang rendah membuat Prancis tidak punya pilihan lain untuk melakukan politik “pintu terbuka” bagi kedatangan para imigran. Pada periode inilah, untuk kepentingan perbaikan ekonomi orang-orang dari eks negara jajahan Prancis di Afrika Utara memilih meninggalkan negaranya untuk datang ke Prancis. Hubungan antara negara kolonial dan

negara jajahan tentu memiliki dampak kedekatan tertentu. Negara seperti Aljazair yang pasca mendapatkan kemerdekaan di tahun 1962, statusnya masih tetap merupakan wilayah integral Prancis dimana orang-orangnya pun diakui memiliki kewarganegaraan Prancis. Status hukum tersebut tentu saja memudahkan mereka untuk keluar dan masuk Prancis. Lain halnya dengan negara seperti Maroko dan Tunisia, meskipun juga eks jajahan namun statusnya bukan sebagai “*direct colonialism*” tetapi Prancis lebih sebagai negara pelindung atau “*protektorat*”. Sekitar tahun 1960an gelombang imigran asal Afrika Utara mulai memenuhi wilayah pinggiran kota.

Meskipun demikian, pada kurun waktu tersebut belum ada sebuah gejolak sosial di tengah masyarakat yang multi budaya tersebut. Para sarjana di Prancis sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada yang menjadikan soal imigran ini sebagai objek studi mereka padahal hingga pertengahan abad ke XX tersebut, generasi imigran telah menjadi bagian integral Prancis (Hargreave, A ; 2007). Ketiadaan tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa keberadaan imigran tidaklah menjadi sebuah masalah sosial saat itu. Seperti halnya kehadiran imigran asal negara tetangga pada abad sebelumnya, kehadiran orang-orang Afrika Utara di masa *les trentes glorieuses* ini diapresiasi dan dianggap berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Prancis.

Perubahan terjadi sejak pertengahan tahun 1970an ketika terjadi resesi ekonomi pada tahun 1974 dimana harga minyak dunia melonjak. Prancis sebagai negara importir minyak yang cukup besar mulai khawatir akan ekonomi mereka. Resesi tersebut diperkirakan akan membuat laju ekonomi menurun sehingga akan melahirkan pengangguran. Konteks inilah yang pada awalnya melahirkan sebuah kebijakan yang mulai ketat terhadap aliran masuk orang asing ke

Prancis. Pemerintahan Valéry Giscard D’estaing (1974 – 1981), Pemerintahan dari kelompok tengah – kanan ini melakukan politik pembatasan terhadap imigran. Di tengah upaya tersebut, hasilnya tidak terlalu efektif untuk mengurangi jumlah imigran yang datang. Kehadiran imigran laki-laki pada periode sebelumnya berkonsekuensi pada kehadiran keluarga mereka (anak dan istri) pada tahun-tahun berikutnya. Karena itulah, jumlah imigran dengan motif “*Reunifikasi Keluarga*” (*regroupement familiale*) membengkak. Alih-alih dengan pembatasan imigran, jumlah imigran menurun yang terjadi justru sebaliknya. Justru keluarga imigran makin kelihatan di ruang-ruang publik. Perlu diketahui bahwa pada awalnya, imigran asal Afrika utara tersebut berciri maskulin, sebab mereka datang untuk bekerja dan ditempatkan umumnya di wilayah-wilayah pinggiran kota dekat dari wilayah industri. Namun setelah “*reunifikasi Keluarga*”, kehadiran keluarga-keluarga imigran mulai nampak mencolok sebab anak-anak mereka mulai juga mengakses pendidikan publik.

Khawatir akan semakin tak terbendungnya jumlah imigran, pemerintah Prancis melalui menteri pekerja imigran, Lionel Stoléru (1977 – 1981) mengambil kebijakan untuk melakukan pemulangan terhadap imigran. Melalui kerjasama bilateral antara Prancis dan negara asal imigran, pemerintah Prancis memberi insentif biaya dan pelatihan keterampilan (*l’aide de retour*) yang berguna bagi mereka di negara asal. Kebijakan ini meskipun membawa hasil, namun jauh dari target yang ditetapkan (Weil, 1991). Meskipun kebijakan ini diapresiasi oleh negara asal imigran, tetapi imigran sendiri yang sudah terlanjur menikmati kehidupan yang lebih baik di Prancis enggan untuk kembali ke negara mereka. Sistem jaminan sosial negara tersebut dianggap menjadi salah satu alasan mereka memilih Prancis.

Dalam hal kebijakan, terlihat bahwa orientasi politik kelompok “*kanan*”

sejak awal telah bersikap “keras” terhadap imigran, sementara kelompok “kiri” punya kecenderungan lebih akomodatif. Prancis dibawah pemerintahan Gaullist yang republikan (kelompok kanan), mengadopsi hukum *Pasqua* yang membatasi reunifikasi keluarga dan pembatasan terhadap akses jaminan sosial bagi imigran. Sebaliknya, pada masa kepresidenana François Mitterrand yang sosialis, ribuan pekerja asing tanpa dokumen (*sans papiers*) diberi kemudahan mengurus dokumen untuk tinggal di Prancis melalui program “Regularisasi”. Demikian pula, pada tahun 2002 – 2012,

Periode ketika Nicolas Sarkozy (Kelompok kanan) berkuasa baik saat menjadi menteri dalam negeri maupun presiden, diumumkan sebuah kebijakan “*chosen immigrant*”, politik yang terbuka untuk imigran yang potensial dan berkualitas untuk menunjang ekonomi tetapi lebih “keras” untuk alasan kemanusiaan untuk reunifikasi keluarga. (Vivrey, 2010). Imigran yang dianggap memiliki kompetensi dan talenta menjadi diprioritaskan, sehingga diberikan izin tinggal yang lebih aksesibel melalui *carte de séjour compétence et talent*.

Tabel 2
Data imigran berdasarkan negara kelahiran (2016)

No	Negara	Jumlah (individu)
1	Aljazair	807.500
2	Maroko	755.400
3	Portugal	622.000
4	Italia	286.400
5	Spanyol	248.400
6	Tunisia	275.900
7	Turki	246.900
8	China	104.100
9	Senegal	100.800
10	Komoro	90.300

Sumber :

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4197231?sommaire=4197305&q=population>

Bukan hanya soal imigran yang datang untuk mencari pekerjaan ataupun repatriasi keluarga, para pencari suaka ke Prancis dewasa ini juga mulai mengalami pembatasan-pembatasan tertentu. Tradisi humanis Prancis yang dengan tangan terbuka di masa lampau menerima pencari suaka, saat ini sepertinya mengalami perubahan orientasi. Laporan Létard dan Touraine (2013) yang memberikan laporan kepada menteri dalam negeri Prancis mengatakan bahwa para pencari suaka sedang mengalami “ancaman” sebab aturan-aturan negara semakin selektif dalam hal tersebut. Bahkan lebih jauh,

Emmanuel Macron yang merupakan presiden dari kelompok tengah menunjukkan sikap yang cukup ‘ketat’ bagi imigran di Prancis. Pada sebuah pidatonya tahun 2017, dia mengungkapkan perlunya manajemen yang efektif dalam penanganan imigran dimana perlu “*complete refoundation*” dalam hal tersebut. Salah satunya adalah mengatasi imigran sejak dari negara asalnya dan juga negara tempat transit mereka (Grappi, G, 2021. Hlm. 147 – 166)

Politik dan Tantangan Integrasi di Prancis

Menggunakan kacamata teori Giddens yang dikemukakan sebelumnya, terlihat bahwa tidak ada model yang betul-betul pas menggambarkan model integrasi yang diterapkan di Prancis. Namun, secara prinsip lebih dekat dengan “model integrasi-asimilasi” yakni negara mengharapkan agar imigran melepaskan seluruh kebudayaan lama mereka dan berasimilasi dengan kebudayaan masyarakat di mana mereka tinggal. Hanya saja di Prancis, model asimilasi yang dikehendaki bersifat formal yakni sejauh menyangkut kehidupan publik. Masyarakat diperbolehkan bahkan diberi kebebasan mempraktekkan kebudayaan mereka tetapi terbatas di wilayah privat. Hal tersebutlah misalnya yang menjadi polemik soal praktek dan larangan beragama di ruang publik yang menurut sebagian kalangan politik tersebut bertentangan dengan prinsip penerapan Hak Asasi Manusia terkait kebebasan beragama. Hal yang terakhir inilah yang dewasa sering menjadi perdebatan bahkan menimbulkan kekerasan di Prancis.

Pengaruh prinsip republikanisme Prancis pasca revolusi di akhir abad ke XIX yang melahirkan prinsip hukum pemisahan kekuasaan gereja dari negara pada tahun 1905, dikenal dengan prinsip *laïcité* menjadi fondasi kenegaraan Prancis hingga hari ini. Hal ini menjadi prinsip dasar bagaimana mengatur hubungan agama dan negara, bagaimana ekspresi keagamaan mendapatkan kebebasan di ruang privat - komunal tapi mendapat pembatasan di ruang publik. Prinsip ini menjadi tantangan integrasi penuh bagi orang Prancis yang beragama islam umumnya yang merupakan imigran. Salah satu praktek keagamaan yang pernah menjadi bahan perdebatan adalah ketika sekelompok muslim melakukan sholat jumat di jalan raya yang menarik perhatian publik. Kalangan kaum republikan menganggap praktek tersebut tidak sejalan dengan prinsip *laïcité* sementara kaum

muslim menganggap itu adalah bagian dari hak-hak warga untuk menjalankan ibadah dengan alasan ketiadaan tempat yang cukup menampung jamaah sehingga mereka melaksanakan ibadah di tempat umum yang terbuka.

Hal yang sama dirasakan juga oleh para pegawai baik pemerintah maupun swasta juga pelajar dan mahasiswa yang beragama islam dimana di waktu-waktu sholat mereka kesulitan melakukan sholat karena jauhnya tempat ibadah sementara melakukan di tempat kerja dianggap terlarang. Akhirnya beragam cara digunakan untuk mensiasati masalah tersebut, ada yang sholat sambil duduk, ada yang mencari-cari ruangan terpencil yang dianggap aman karena tidak dilewati oleh publik secara regular dan ada pula yang akhirnya memakai dalil agama yang akhirnya mereka melakukan sholat digabung pada saat pulang kantor. Di kampus Inalco (*institut national des langues et civilisations orientales*) yang terletak di jalan Grand Moulins, Paris, di saat waktu sholat, mahasiswa seperti sudah mengetahui secara rahasia bahwa mereka dapat melakukan sholat jamaah di satu ruangan tertentu yang sebenarnya merupakan ruang penyimpanan alat-alat pemadam kebakaran yang secara normal tidak boleh di masuki. Namun mahasiswa dan mahasiswi tersebut karena asumsi tidak ada orang yang akan masuk ruangan tersebut merasa aman untuk melakukan sholat berjamaah di tempat tersebut. Meskipun sebenarnya ada kamera pengawas, namun tampak mereka tidak merasa terganggu. Salah seorang diantara mereka yang pernah diajak komunikasi mengatakan bahwa pihak keamanan yang berada di ruangan kontrol media juga adalah orang islam. Bahkan menurut si mahasiswa, pihak keamanan mengetahui hal tersebut dan hanya mengingatkan supaya jangan memancing perhatian publik.

Sikap pihak keamanan tersebut merupakan sebuah representasi kuatnya

semangat komunalisme di antara sesama imigran yang beragama Islam. Sikap tersebutlah misalnya yang memicu ketidak sukaan sebagian orang Prancis terhadap para imigran. Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Pak Kerdavou (42 tahun) seorang polisi *police municipal* di daerah Rungis mengeluhkan sikap rekan kerja dia yang berlatar imigran. Menurutnya rekannya tersebut tidak mampu berintegrasi dengan nilai-nilai republikan Prancis. Selain sering membicarakan hal-hal terkait keyakinan keagamaannya, ia juga menurut Pak Kerdavou bisa bertindak berbeda terhadap para pelanggar hukum yang kebetulan berasal dari kebudayaan yang sama dengan dirinya. Demikian pula pendapat Ibu Martine (62 tahun) seorang pensiunan pegawai kementerian Ekonomi yang kami wawancarai di daerah Chevilly Larue, mengungkapkan perasaan tidak senangnya terhadap para imigran yang menurutnya bersifat sangat komunal dan terkesan tidak mau bergabung dengan orang Prancis “asli”. Seharusnya menurut Ibu Martine sebagai pendatang, mereka harus bersikap lebih baik dan terbuka agar dapat terjalin hubungan yang lebih harmonis.

Apa yang digambarkan di atas, hanya merupakan satu sisi kendala integrasi masyarakat di Prancis. Namun di sisi lain tak jarang juga diantara mereka sudah tidak ada lagi hambatan dalam berinteraksi. Terutama generasi-generasi kedua dan ketiga imigran yang sudah melewati masa kecil bersama di sekolah-sekolah publik mulai dari *crèche* (setingkat TK) hingga tahap universitas.

Mengenai hal tersebut di atas, terjadi sebuah perdebatan mengenai akar masalahnya, apakah masalah tersebut lahir dari ketidakmampuan imigran melakukan integrasi budaya ataukah masalahnya adalah karena adanya kesenjangan ekonomi. Sikap-sikap komunal yang dipelihara oleh imigran justru muncul karena perasaan termarginalisasi terutama dalam hal ekonomi yang berdampak pada

eksklusi sosial. Hal ini bukan sebuah rekaan semata sebab jika memperhatikan dari pola pemukimannya, para imigran umumnya tinggal di perumahan-perumahan sosial yang disubsidi pemerintah. Hal tersebut karena penghasilan mereka yang tidak seperti orang Prancis non-migran (tentu saja ada imigran yang sudah berhasil dan menduduki kelas sosial yang elit atau sebaliknya orang Prancis non migran yang penghasilannya rendah). Seorang migran Mammadou (35 tahun) asal Mali mengungkapkan adanya perbedaan sikap ketika dirinya melamar pekerjaan dimana saat wawancara melalui telepon. Orang yang mewawancarnya menanyakan asal negaranya sebab bahasa Prancisnya memiliki aksen berbeda dengan orang-orang Paris. Sikap tersebut menurutnya seperti ada diskriminasi karena asal-usul.

Dalam sebuah penelitian (Labeau, B : 2007) memperlihatkan kasus evolusi ruang di wilayah La plaine de France, di Saint Dennis. Wilayah ini pada mulanya adalah wilayah pinggir dimana dulunya banyak terdapat industri sehingga imigran-imigran banyak yang tinggal di seputaran wilayah tersebut. Sekitar tahun 1970an ketika terjadi perluasan wilayah kota Paris dibangun beragam moda transportasi yang menghubungkan daerah ini dengan wilayah lain dan juga menjadi daerah penghubung antara Paris dan Bandar udara CDG. Perlahan-lahan wilayah ini mengalami transformasi dimana semakin banyak kantor yang didirikan sementara industri semakin bergeser menjauh. Wilayahnya bertransformasi menjadi satu kesatuan dengan pusat kota Paris dengan segala infrastruktur dan fasilitasnya. Evolusi ruang tersebut hanya menyentuh sedikit pada sektor kependudukannya. Sebuah paradox, peningkatan jumlah lapangan kerja di satu sisi di wilayah tersebut tapi di sisi lain meningkat juga orang yang tereksklusi dari dunia kerja di wilayahnya. Masalahnya adalah kualitas SDM yang dipersyaratkan oleh dunia kerja

tidak sesuai dengan profil pendidikan umumnya masyarakat di daerah tersebut sehingga sekitar 57% orang yang bekerja di la Plaine de France merupakan warga yang tinggal di luar wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan salah satu kendala yang dihadapi oleh keluarga imigran untuk mengakses pekerjaan.

Secara geografi, sekitar 75% perumahan sosial bersubsidi di wilayah seperti Saint-Denis, Villataneuse, Garges lès Gonesse – Sarcelle merupakan konsentrasi keluarga-keluarga miskin di wilayah Paris dan île de France. Tak jarang sebuah perumahan yang jika mengikuti aturan mewajibkan seseorang memiliki luas ruangan kurang lebih 3 x 3 meter, pada perumahan yang disebutkan di atas banyak perumahan yang dihuni oleh beberapa keluarga yang mana mereka adalah umumnya imigran. Dengan potret seperti ini semangat komunitarianisme mudah dipupuk. Solidaritas antara sesama juga menguat. Bahkan imigran-imigran ilegal ditampung di rumah-rumah tersebut. Karena itu, akar masalah integrasi di Prancis menjadi perdebatan yang masih terus berlangsung antara kelompok republikan yang menganggap imigran tidak bisa menyatu dengan nilai-nilai dan budaya Prancis karena keterikatan mereka dengan kebudayaan asal sementara argumen kontra mengatakan bahwa integrasi sulit terwujud bukan karena persoalan kebudayaan tapi adanya kesenjangan ekonomi dan eksklusi sosial.

Adanya pemukiman berbasis kelompok di Prancis yang juga identik dengan kemiskinan jelas menunjukkan bahwa masyarakatnya masih belum terintegrasi secara baik. Segregasi masih nampak nyata yang sifatnya ambigu dalam pendefinisannya, antara distingsi kelas sosial (miskin) dan rasial kultural (imigran Arab-Afrika – Islam). Namun sekali lagi tak ada fenomena sosial yang dapat dijelaskan secara utuh tanpa ada sisi lain yang menjadi kontrasnya. Jika segregasi sosial tersebut menggambarkan potret

disintegrasi, maka ada fakta lain yang menunjukkan adanya sebahagian yang telah terintegrasi secara sempurna. Hal tersebut terlihat melalui semakin seringnya pernikahan lintas etno-rasial dilakukan. Menurut data statistik tahun 2106 di wilayah metropolitan Prancis dari 219.549 pernikahan yang terdata, terdapat 32.2174 atau sekitar 15% pernikahan yang berlangsung antara orang Prancis dan imigran. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dengan presentasi angka yang masih kecil, namun integrasi sempurna sudah terjadi sebab pernikahan adalah hubungan yang paling intim dimana sesame pasangan pastilah sudah mampu saling menerima keberbedaan di antara mereka.

KESIMPULAN

Diskursus tentang imigran di Prancis dewasa ini tak lepas dari menguatnya kelompok eksrem kanan dalam politik, sebuah fenomena yang dapat terlihat menguat bukan hanya dalam skala nasional Prancis tapi juga secara global di banyak negara. Dalam hal ini, prinsip republikanisme Prancis tertantang dengan hadirnya imigran dengan karakteristik yang berbeda dengan Imigran yang datang dari negara tetangga. Jika di masa lampau prinsip tersebut mampu mengasimilasikan kebudayaan imigran dari Italia, Belgia, Spanyol dan negara-negara lain dari wilayah tetangga sehingga hari ini anak-anak mereka tidak lagi terbedakan secara kebudayaan dengan orang Prancis “asli”, maka hari ini prinsip tersebut diuji dengan kehadiran imigran dengan identitas Islam.

Ditengah arus informasi yang semakin global, setiap kebijakan politik pemerintah terhadap imigran tidak bisa lagi dipisahkan dengan komunitas internasional. Kebijakan yang dianggap atau diapresiasi intoleran terhadap imigran tersebut, bukan hanya lagi soal Prancis semata. Komunitas Islam internasional

dipastikan akan memberikan respon balik. Dalam tegangan inilah, Prancis berada dewasa ini.

Daftar Pustaka

- Alba, R dan Nee, V. (2003). *Remaking the American mainstream: Assimilation and contemporary immigration*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- Castells, M. (1999). *Le pouvoir de l'identité* (diterjemahkan dari versi bahasa Inggris oleh Paul Chemla). Fayard
- Giddens, A. (2009). *Sociology* (Edisi ke 6). Polity press. USA
- Grappi, G. (2021). *France and Migration ; between logistification and Ethical Minimalisme* dalam The EU migration system of Governance (diedit oleh Michela Ceccorulli dkk). Palgrave Macmillan. Swiss.
- Hargreaves, A.G. (1995). *Multi-ethnic France : Immigration, Politics, Culture and society* (edisi ke 2). Routledge. New York
- Lebeau, B. (2007). *Intégration fonctionnelle et marginalisation sociale en Plaine de France (Functionnal integration and social marginalization in Plaine de France)*. Dalam. Bulletin de l'Association de géographes français ; 315-326.
- Létard, V dan Touraine, J-L. (2013). *Rapport sur la réforme de l'asile*.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory*. Palgrave. New York.
- Viprey, M. (2010). *Immigration choisie, immigration subie: de discours à la réalité*. La revue de l'Ires, 1 (64), 149 -169
- Weil, P. (1991). *La France et ses étrangers; l'aventure d'une politique de l'immigration, 1938 – 1991*. Calmann-Levy. Paris
- Weil, P. (2021). *De la laïcité en France*. Grasset – Paris
- <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212>
- <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4197231?sommaire=4197305&q=population>